



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Akselerasi Transformasi Digital: Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Literasi Digital

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rabu, 24 Februari 2021



ARAHAN KEBIJAKAN



5 Arah Presiden



Mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet



Mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis



Mempercepat integrasi Pusat Data Nasional



Menyiapkan talenta digital



Menyiapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital



4 Sektor Strategis



Infrastruktur Digital



Pemerintahan Digital



Ekonomi Digital



Masyarakat Digital



6 Arah Strategis



Membangun infrastruktur digital dan konektivitas yang inklusif, aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi



Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi di berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional



Meningkatkan kapabilitas digital di sektor prioritas untuk memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas



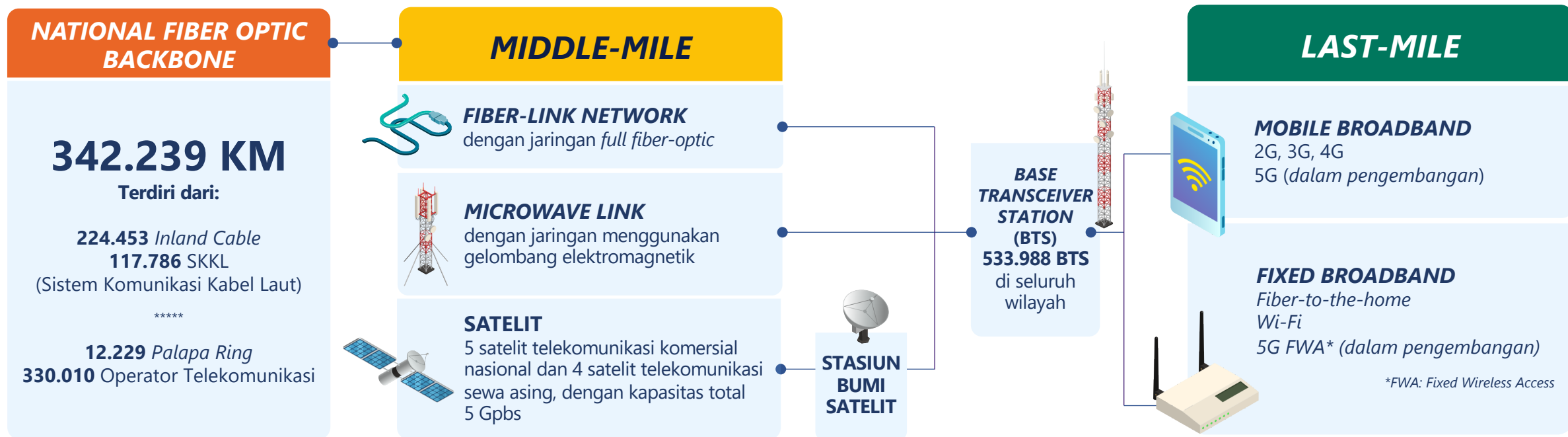
Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik



Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital



Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi

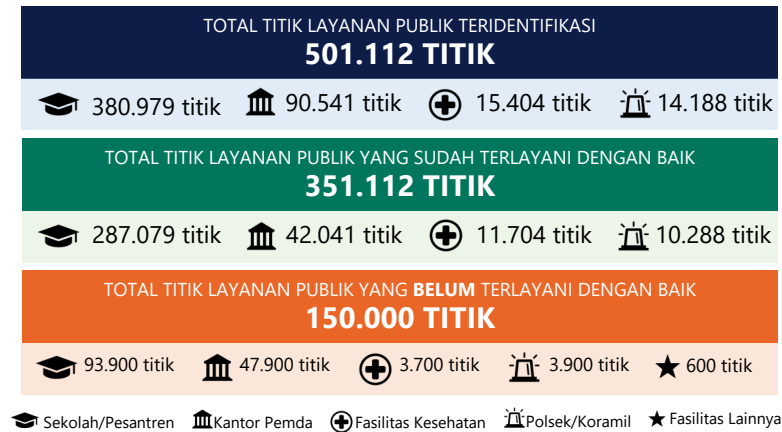


KEBUTUHAN RIIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1 Mobile Broadband berbasis 4G

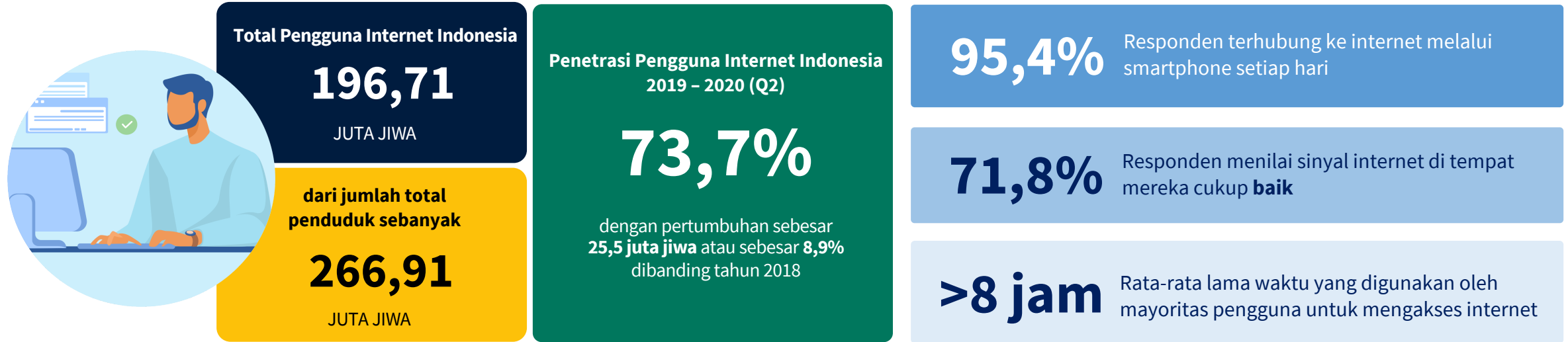


2 Fixed Broadband dengan teknologi Satelit



LINIMASA PEMBANGUNAN

Q3-2023	2024	2030
Backup 80 Gbps SATRIA-1 150 Gbps 1 Mbps/titik	 SATRIA-2 300 Gbps s.d. 10 Mbps/titik	 SATRIA-3 500 Gbps s.d. 20 Mbps/titik



Sumber: APJI (2020)

PERALIHAN PREFERENSI MASYARAKAT DALAM KONSUMSI BERITA

Pembaca Media Online

6 juta

VS

Pembaca Media Cetak

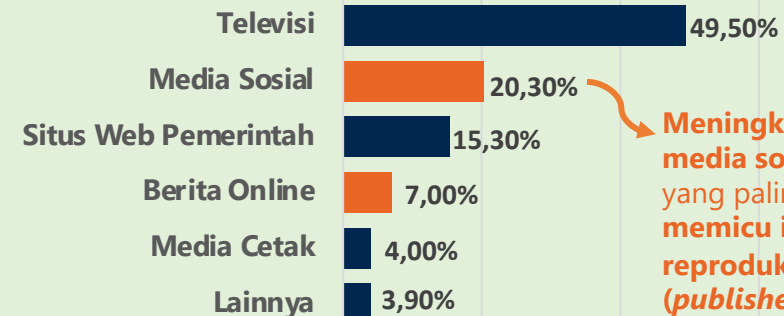
4,5 juta

Preferensi cara mendapatkan informasi:

Televisi (96%), Papan Iklan/*Billboard* (52%), Internet (43%), Radio (37%), Media Cetak (8%)

Sumber: Nielsen dalam Suara.com, 2020

Survei Katadata & Kementerian Kominfo (2020): "Sumber media yang paling dipercayai?"



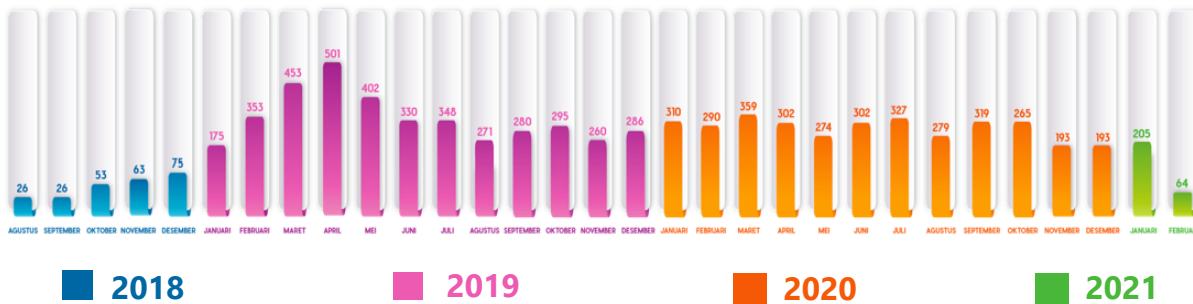
Meningkatnya dominasi media sosial sebagai media yang paling dipercayai, dapat memicu isu hak cipta/hak reproduksi berita (*publisher's right*)

Ancaman di Internet: Hoaks dan Konten Negatif

4

Temuan Isu Hoaks

Total Isu Hoaks periode Agustus 2018 s.d. 14 Februari 2021: **7.885** Isu Hoaks



Kategorisasi Temuan Isu Hoaks

Pemerintahan
1.568

Kesehatan
1.554

Politik
1.238

Kejahatan
484

Internasional
474

Fitnah
399

Penipuan
564

Bencana Alam
343

Agama
290

Mitos
213

Pendidikan
52

Perdagangan
51

Lain-Lain
655

Statistik Penanganan Konten Negatif Pada Situs Internet periode s.d. 12 Februari 2021: **1.348.110**

Pornografi
1.074.327

Perjudian
252.538

Berita Bohong/ Hoaks
25

Penipuan
12.522

Kekayaan Intelektual
5.381

Konten yang
Meresahkan Masyarakat
23

Konten Negatif yang
Direkomendasikan Instansi
Sektor
3.007

Terrorisme/
Radikalisme
512

Fitnah
12

SARA
188

Pelanggaran Keamanan
Informasi
144

Separatisme/ Organisasi
Berbahaya
4

Perdagangan Produk
dengan Aturan Khusus
128

Konten Melanggar Nilai
Sosial dan Budaya
26

Kekerasan/ Kekerasan
pada Anak
9

Total Pemblokiran Konten Negatif: 2.220.115

Statistik Penanganan Konten Negatif Pada Media Sosial Periode s.d. 12 Februari 2021: **872.005**

File Sharing

2.419

Facebook, WhatsApp,
dan Instagram

29.635

Google dan
YouTube

6.284

Twitter

832.537

Telegram

1.085

LINE

22

TikTok

23

Sumber: Kementerian Kominfo (2021)

Inisiasi penguatan literasi digital masyarakat Indonesia yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kominfo dengan
108 Lembaga dan komunitas pegiat literasi

Capaian



462 titik

Lokasi yang sudah dijangkau



>200.000

Partisipan aktif



>75 juta

Warganet yang telah terjangkau literasi digital



Award dari Mark Plus sebagai *Indonesia Brand Endorsement of The Year 2018*



Dinobatkan sebagai *Champion* dalam kontes WSIS Prizes tahun 2018



Dinobatkan sebagai *Winner* dalam kontes WSIS Prizes tahun 2020

Tema dan Pilar



Digital Skills



Digital Ethics



Digital Culture



Digital Safety

Program Unggulan

- 1 Literasidigital.id**
Akses ke materi literasi digital
- 2 Kelas Cakap Digital**
Pelatihan kecakapan digital yang dilakukan Kominfo dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, industri, dan mitra
- 3 Kreator Nongkrong**
Pemberdayaan kreator konten
- 4 Siberkreasi Hangout Online**
Program lokakarya literasi digital untuk umum dengan berbagai tema, yaitu: *Digital Government*; *Digital Society*; serta *Digital Economy*
- 5 Riset Literasi Digital**
Kajian pengembangan kurikulum dan indeks literasi digital
- 6 Kelas Podcast Siberkreasi**
Kelas pelatihan pembuatan *podcast* untuk umum
- 7 Kolaborasi bersama Komunitas Lokal**
Program seminar, ToT, maupun *coaching clinic* untuk masyarakat guna membahas literasi digital sesuai perkembangan dan budaya lokal masing-masing daerah

CAPAIAN KEGIATAN DARING TAHUN 2020



189

Jumlah total kegiatan daring



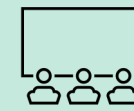
96.142

Peserta tersertifikasi



559.222

Jumlah warganet yang terjangkau oleh konten literasi digital



602.222

Total jumlah penonton



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju!

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3452841
E-mail: humas@mail.kominfo.go.id

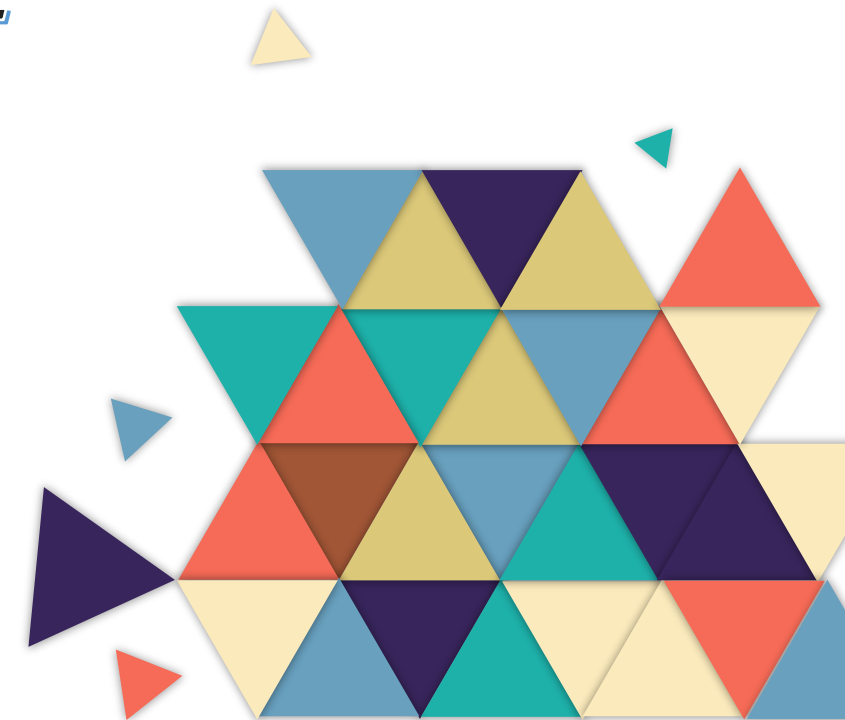
www.kominfo.go.id | t: @kemkominfo | ig: @kemenkominfo





AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL:
PROGRAM NASIONAL
LITERASI DIGITAL

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jakarta, 24 Februari 2021



Lanskap Aktivitas Digital Indonesia



196,71 juta jiwa
Pengguna internet



YouTube menjadi *all-in-one platform* yang paling sering dikunjungi **93,8%**



Whatsapp menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak diakses **87.7%**



Media sosial yang paling banyak dimiliki **89.8%**



30 juta

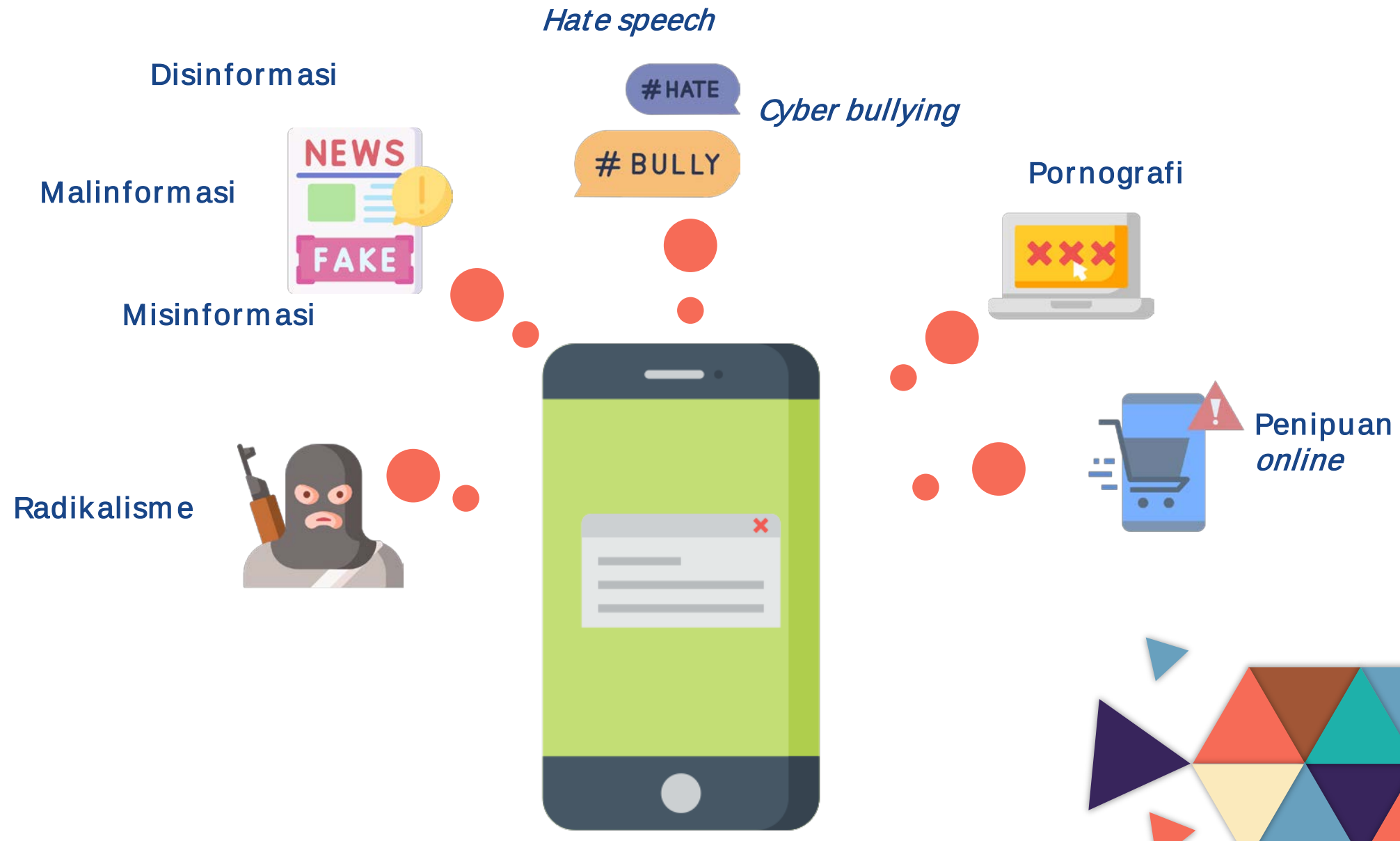
Konsumen *E-Commerce* pada 2017 (McKinsey 2017)



9,4 Juta

UMKM sudah *go digital* pada 2020

Tantangan dan Risiko di Ruang Digital



Visi & Definisi Literasi Digital

Visi Presiden untuk percepatan transformasi digital dan definisi literasi digital oleh Menteri Kominfo



5 Visi Presiden untuk Indonesia

- Pembangunan infrastruktur
- **Pembangunan SDM**
- Keterbukaan Investasi
- Reformasi Birokrasi
- Penggunaan APBN fokus & tepat sasaran

5 Arahan Presiden untuk percepatan Transformasi Digital

- Perluasan akses & peningkatan infrastruktur digital
- Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis
- Percepatan integrasi Pusat Data Nasional
- **Persiapan kebutuhan SDM talenta digital**
- Regulasi, skema pendanaan & pembiayaan transformasi digital

➔ **Literasi digital** berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai.

Literasi digital adalah fondasi dasar untuk mewujudkan pilar masyarakat digital

Kerangka Kerja Literasi Digital



Kerangka Kerja Literasi Digital untuk Program



Ekosistem Mitra

Bersama Siberkreasi, Kementerian Kominfo sudah bekerja sama dengan 108 lembaga dan komunitas aktivis literasi digital

Mitra Institusi Pemerintah K/L



- Dukungan kebijakan relevan
- Menjadi strategic partner kegiatan bersama di berbagai wilayah

Mitra Komunitas



- Menjadi mitra pelaksana kegiatan, penyuluh/narasumber serta menyusun konten/materi bersama

Mitra Lembaga Riset & Perguruan Tinggi



- Mitra untuk menyusun kurikulum literasi digital
- Merancang dan mendampingi kegiatan survey/evaluasi/riset

Mitra Provider Telekomunikasi



- Menjadi mitra untuk memberikan informasi kegiatan literasi digital melalui sms blast dan landing page di website

Mitra Media & Platform Digital



- Menjadi platform untuk media shower
- Menyiarkan kegiatan secara online
- Menjadi mitra pelaksana kegiatan, narasumber, dan menyusun konten bersama

Mitra Lembaga Internasional



- Menyediakan expert untuk sharing knowledge, technical assistant kurikulum internasional literasi digital

catatan: semua gambar/logo/brand/instansi merupakan contoh dan/atau ilustrasi kegiatan.



Pelaksanaan Program Literasi Digital kolaborasi dengan KEMENDAGRI menargetkan seluruh masyarakat kota, kabupaten dan desa di seluruh wilayah Indonesia



Pelatihan Kelas Siberkreasi Cakap Digital Dasar untuk Masyarakat Umum dan Kelas Siberkreasi Berdaya untuk Masyarakat di Daerah 3T, dan Perbatasan



Program ini akan dibuat dengan kolaborasi Kominfo dengan **seluruh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati), ASN di pemerintah kota/kabupaten setempat, dan pamong praja** seluruh Indonesia untuk menargetkan masyarakat di tingkat kabupaten



Konten menggunakan **Materi Kelas Cakap Digital Dasar dan Madya serta Materi Kelas Siberkreasi Berdaya** yang akan disusun dan dikembangkan oleh mitra Siberkreasi bersama dengan Kemendagri.



Waktu pelaksanaan program kegiatan sosialisasi kurikulum berlangsung selama setahun dengan **menargetkan seluruh masyarakat di 452 kabupaten/kota dan 62 kabupaten daerah 3T**

Program Literasi Digital akan dilangsungkan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota



x



Jumlah Kegiatan Literasi Digital
selama April-Desember 2021

20.560

Estimasi Peserta Hadir secara Virtual

12.448.750 Per Tahun

- Rata-rata Kegiatan per Bulan: **2.287 Webinar;**
- Target peserta per Bulan : **1.556.094 orang/peserta;**
- Program: Pelatihan Kelas Siberkreasi Cakap Digital Dasar untuk Masyarakat Umum dan Kelas Siberkreasi Berdaya untuk Masyarakat di Daerah 3T, dan Perbatasan, Siberkreasi Netizen Fair, Kelas Podcast Siberkreasi. (4 Pilar dan 40 tema/topik);
- Kegiatan dapat dilaksanakan dengan sosialisasi Dinas dan Pemda setempat;
- Satu kegiatan dihadiri oleh minimal 600 peserta (online);
- Biaya yang akan disediakan dari pusat sudah termasuk narasumber, dan produksi online.

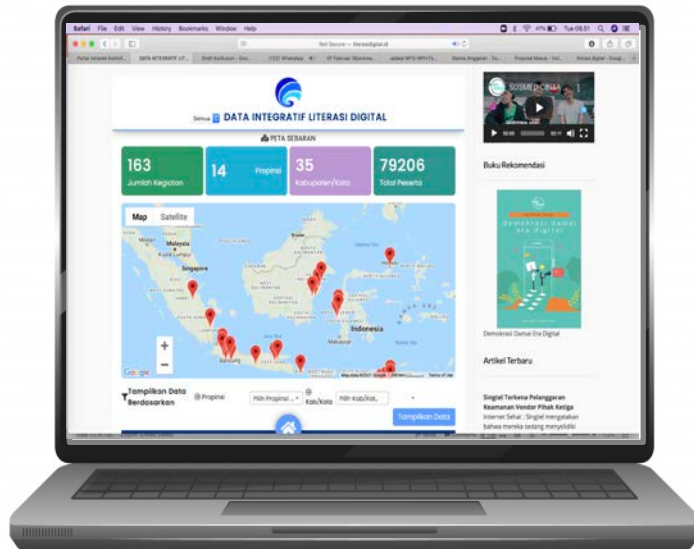
Format Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Keterangan
30'	Persiapan briefing narasumber dan moderator	Tim Teknis
5'	Pembukaan	Moderator
5'	Pembukaan lagu kebangsaan Indonesia Raya (3 stansa)	Moderator
15'	Sambutan keynote speech:	Presiden (3')/ tapping MenKominfo (3')/ tapping Mendagri (3')/ tapping Pimpinan Daerah (6')/ live
120'	Paparan dengan Narasumber : 2 Narasumber Lokal dan 2 Narasumber Nasional 1 Public Figure/Key Opinion Leader	Materi : 4 Pilar Literasi Digital (Skills, Culture, Safety dan Ethics)
5'	Kesimpulan dan Penutup	Moderator

waktu : dalam menit

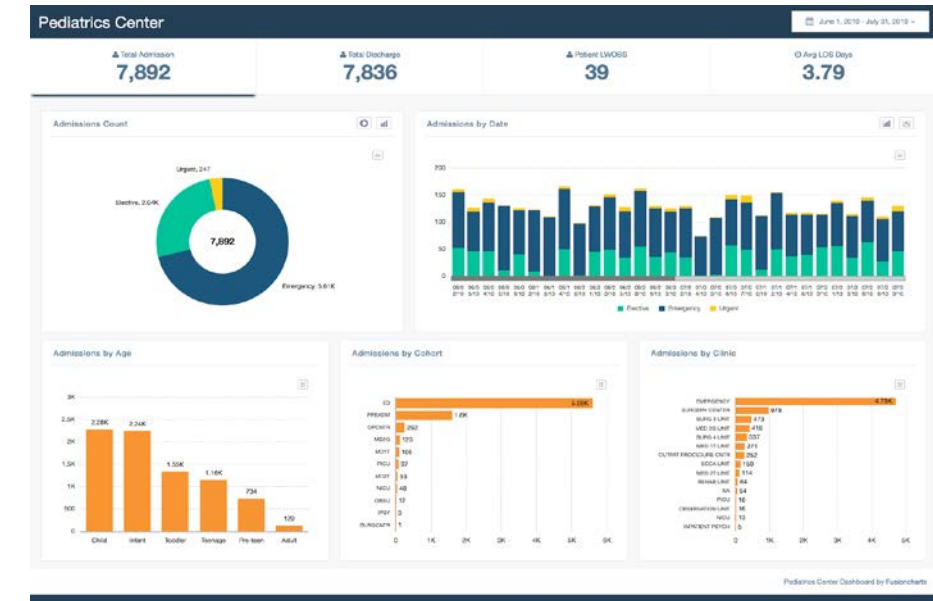
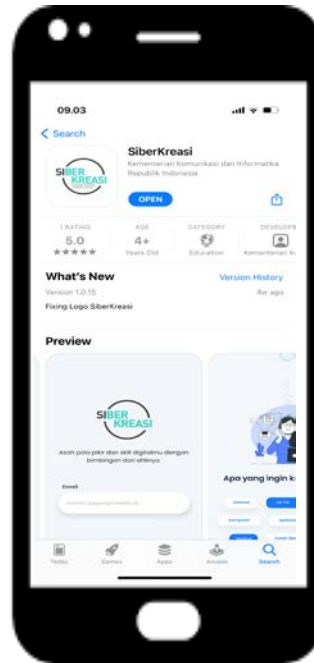
Proses Bisnis Pemantauan

Rancangan cetak biru (blueprint) untuk mendesain dasbor yang berguna memantau target pencapaian



Aplikasi dan Dashboard :

1. Sistem registrasi dan *log-in* untuk seluruh masyarakat
2. *Dashboard* untuk pemantauan program-program Literasi Digital
3. E-sertifikasi dengan *QR code*
4. Aplikasi *Learning Management System*
5. Gamifikasi kurikulum Literasi Digital
6. Konten (Materi dan Video) Literasi Digital
7. Fitur Menu : Zoom, Youtube, Gmail, dll





Skema Pembiayaan Kegiatan Literasi Digital



Pusat

- ✓ Materi literasi digital
- ✓ Narasumber (nasional dan lokal) dan *Key Opinion Leader*
- ✓ Sistem *streaming*
- ✓ Acara TV dan *media coverage*
- ✓ Index ICT readiness per daerah
- ✓ *Dashboard* (yang bisa diakses oleh pemerintah daerah untuk memantau jumlah masyarakat daerah yang sudah mendapatkan literasi digital)
- ✓ Aplikasi nasional yang berisi konten literasi digital

Daerah

- ✓ Menggerakkan *audience* peserta **minimal 600-1000 orang per acara**
- ✓ *Live streaming* untuk kepala daerah





Thank You

Semuel A. Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika
Kementerian Komunikasi & Informatika





PERAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PROGRAM NASIONAL LITERASI DIGITAL TAHUN 2021



DISAMPAIKAN OLEH :
Sri Purwaningsih, SH., MAP
PIh. DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGRI
TAHUN 2021



OUTLINE

- **Arah Dan Sasaran Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah**
- **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Transformasi Digital Sesuai Dengan Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren**
- **Penutup**



Arah Dan Sasaran Prioritas Ditjen Bina Pembangunan Daerah



ANATOMI PEMERINTAHAN



Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN

- Tenaga kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan;
- Komunikasi & Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Penanaman Modal
- kepemudaan dan Olah Raga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan;
- Perpustakaan;
- Kearsipan.

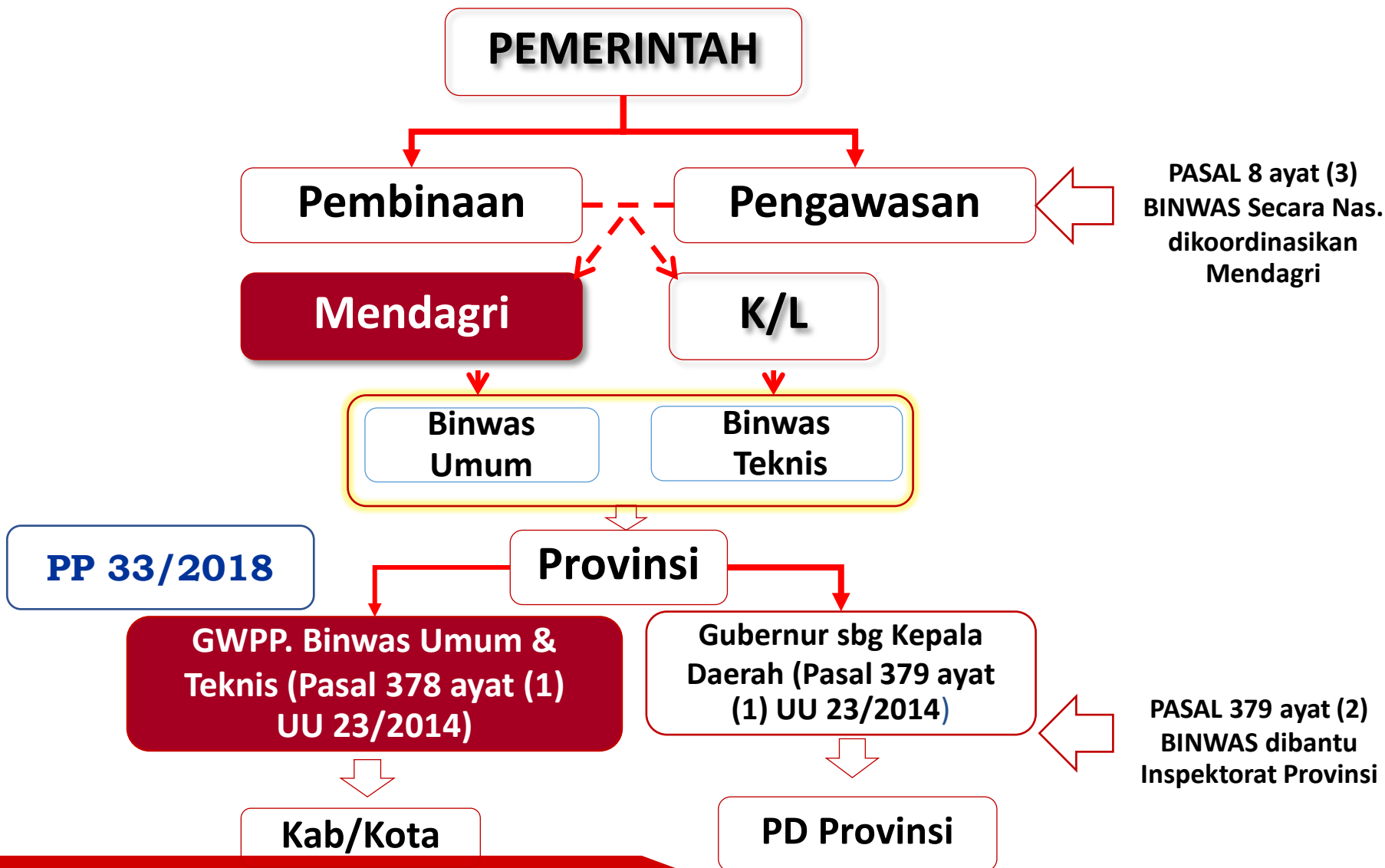
Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan;
- Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Perdagangan;
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH





ARAH DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

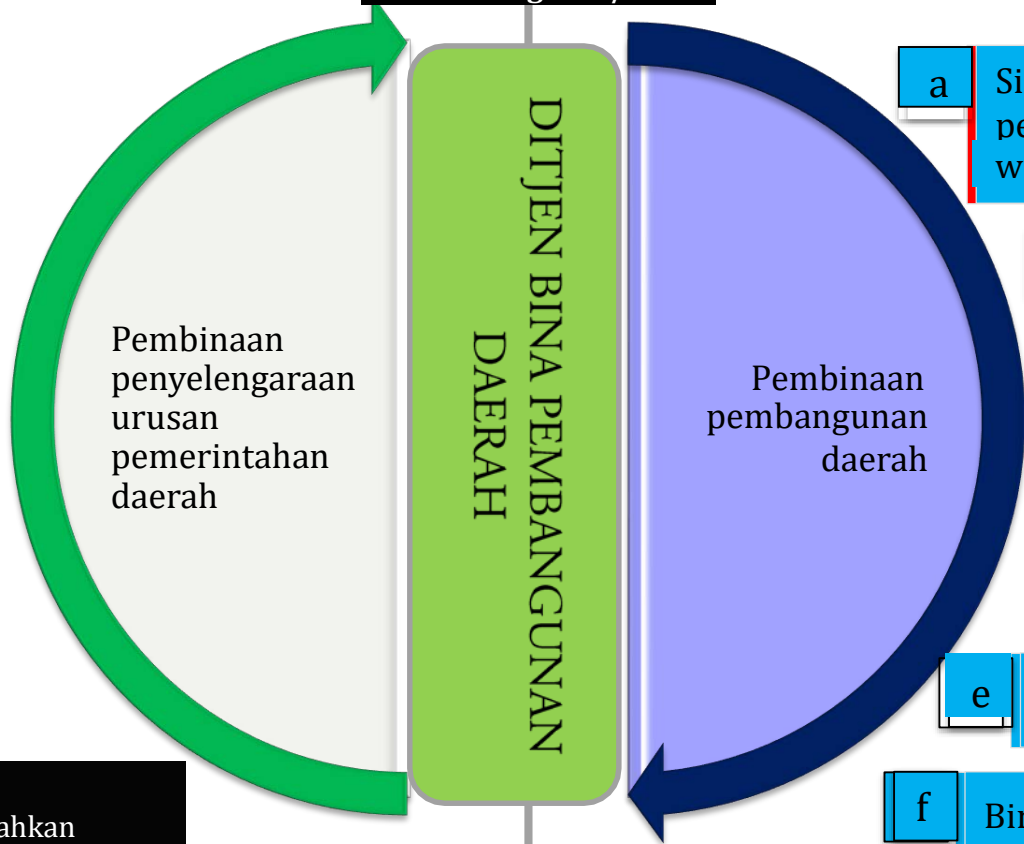
Ditjen Bina Bangda melaksanakan amanat urusan pemerintahan konkuren

Pasal 18
Perpres 11/2015
Permendagri 43/2015

- a Koordinasi SPM dan NSPK
Pasal 19
Perpres 11/2015
- b Pemetaan Urusan Pemerintahan
Pasal 24
- c Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Pasal 370

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional



- a Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah
Pasal 258 dan 259
- b Perencanaan pembangunan daerah
Pasal 260-274
- c Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pasal 275
- d Evaluasi perda tata ruang daerah
Pasal 400
- e Pembinaan Pemda dalam mendorong partisipasi masyarakat
Pasal 354
- f Binwas umum pembangunan daerah
Pasal 374
- g Pembinaan pemda dalam penguatan informasi daerah
Pasal 391-394



TUJUAN KEMENDAGRI

Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Pembinaan Umum Mendagri

- ☐ pembagian Urusan Pemerintahan;
- ☐ kelembagaan Daerah;
- ☐ kepegawaian pada Perangkat Daerah;
- ☐ keuangan Daerah;
- ☒ **pembangunan Daerah;**
- ☐ pelayanan publik di Daerah;
- ☐ kerja sama Daerah;
- ☐ kebijakan Daerah;
- ☐ kepala Daerah dan DPRD; dan
- ☐ bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

URUSAN PEMERINTAHAN MERUPAKAN
FOKUS UTAMA PEMBINAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



Definisi Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.**

Tujuan Pembangunan Daerah

Daerah melaksanakan pembangunan untuk **peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah**

Implikasi Pembinaan

- ☐ Basis Pembinaan adalah urusan pemerintahan
- ☐ Mengedepankan kemandirian daerah melalui paradigma “daerah membangun”
- ☐ Pembinaan fokus pada upaya mendorong daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta sinkronisasi pembangunan antar susunan pemerintahan

Implikasi Pembinaan

- ☐ Pembinaan diarahkan pada penguatan implementasi tujuan pembangunan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan basis urusan pemerintahan
- ☐ Strategi pembinaan melalui sinkronisasi antar urusan pemerintahan, antar daerah dan antar susunan pemerintahan





Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Transformasi Digital Sesuai Dengan Kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM Mendukung TRANSFORMASI Digital SESUAI DENGAN KEWENANGAN

UU 23/2014 tentang Pemda

(cuplikan lampiran UU, Poin P. Pembagian Urusan Bidang Kominfo)

PM Kominfo No. 8/2019

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika

SUB URUSAN APTIKA

1. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah.

Mendukung Implementasi SPBE

1. Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Aplikasi dan Proses Bisnis
3. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Pusat Data Pemerintah Daerah
5. Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik
6. Sistem Penghubung Layanan
7. Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Keamanan Informasi
9. Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
10. Provinsi dan Kota Cerdas
11. Pendaftaran Sistem Elektronik Pemerintah Daerah
12. Portal dan Situs Web
13. Government Chief Information Officer (GCIO) Daerah
14. Nama Domain Pemerintah Daerah

SUB URUSAN IKP

Event Daerah, Isu Tematik, dan Penanganan Hoax

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Layanan Hubungan Media
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
9. Manajemen Komunikasi Krisis
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
11. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah



KERANGKA PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

*Amanat Undang-Undang terkait kewenangan
Pemerintah Daerah dalam urusan
pemerintahan konkuren bidang Kominfo*

Perpres No 18 Tahun 2020
tentang RPJM Nasional Tahun
2020 - 2024

*Inventarisasi target nasional yang dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai kewenangan konkuren bidang
Kominfo*

PM Kominfo no. 8 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang
Kominfo

*Dinas Kominfo menyelesaikan target melalui
program kegiatan sesuai kewenangan yang
diatur NSPK urusan Konkuren bidang Kominfo*

PM Dagri No. 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah

*Dinas Kominfo melaksanakan program
kegiatan sesuai nomenklatur yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri*

SUB URUSAN APTIKA

- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah
- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah

Prioritas Nasional 5
Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung
pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar

- Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pusat Data Pemerintah Daerah
- Aplikasi dan Proses Bisnis
- Provinsi dan Kota Cerdas
- Dst...

- 1.16.03.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 1.16.03.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- 1.16.03.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 1.16.03.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
- Dst...

SUB URUSAN IKP

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah

Prioritas Nasional 7
Memperkuat stabilitas
polhukhankam dan
transformasi pelayanan
publik

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Dst...

- 1.16.02.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- 1.16.02.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 1.16.02.01.06 Pelayanan Informasi Publik
- 1.16.02.01.08 Kemitraan dengan pemangku kepentingan
- Dst...



PENYELARASAN RPJMN 2020-2024 DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMINFO

Prioritas Nasional

Program
Prioritas

Kegiatan
Prioritas

Pro-PN

Proyek K/L

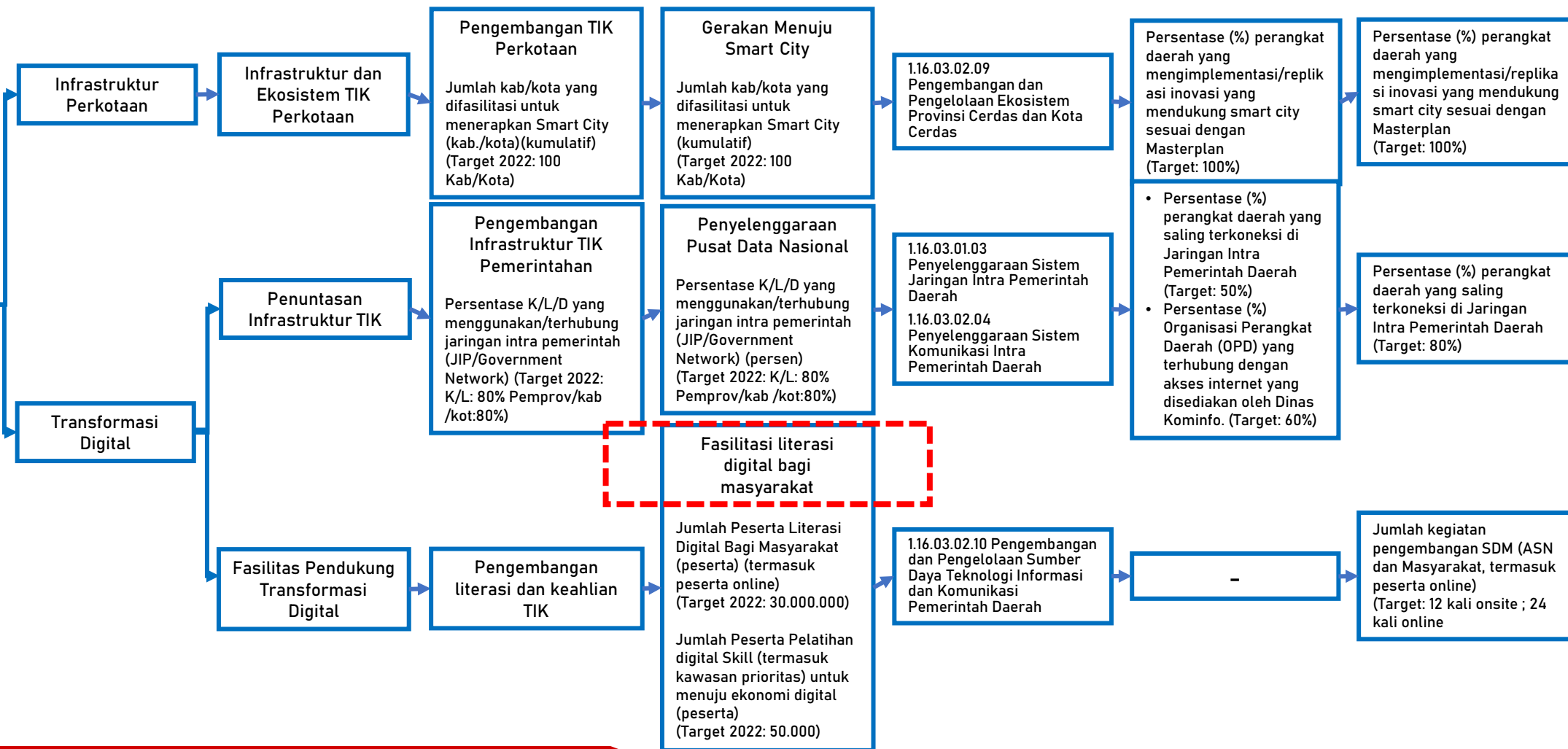
Kegiatan Pemda
Berdasarkan PM
Dagri No. 90/2019

Indikator Kinerja
Pembahasan
Rakortek 2020

Usulan Indikator
Untuk Dibahas Pada
Rakortek 2021

PN
5

Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar





PENYELARASAN RPJMN 2020-2024 DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG KOMINFO

Prioritas Nasional

Program
Prioritas

Kegiatan
Prioritas

Pro-PN

Proyek K/L

Kegiatan Pemda
Berdasarkan PM
Dagri No. 90/2019

Indikator Kinerja
Pembahasan
Rakortek 2020

Usulan Indikator Untuk
Dibahas Pada Rakortek
2021

PN
7

Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi
Pelayanan Publik

Reformasi
Birokrasi dan
Tata Kelola

Penataan
Kelembagaan
dan Proses
Bisnis

Penerapan SPBE
Terintegrasi

- Integrasi portal pelayanan public
- Integrasi portal administrasi pemerintahan (Target 2022: -)

Transformasi
Pelayanan Publik

Pelayanan Publik
Berdasarkan
Elektronik (e-
Services) yang
Terintegrasi

Penyusunan Kebijakan
Infrastruktur dan aplikasi SPBE
Target: 8 Peraturan Menteri
yang mendukung SPBE

Integrasi Perencanaan,
Penganggaran, Pengadaan
Barang Jasa, Akuntabilitas
Kinerja, serta Pemantauan dan
Evaluasi di Pusat dan Daerah
Target: Integrasi internal pemda

Penyelenggaraan Pusat
Data Nasional

Jumlah penyediaan data center
nasional
(Target 2022: 2 Data Center)

Pengembangan SPBE Terpusat
Target: Jaringan Intra
Pemerintah berbasis seluler
bagi 100.000 ASN

Penyediaan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

Persentase terwujudnya
interoperabilitas antara layanan
SPBE
(Target 2022: 100%)

Pembangunan portal Pelayanan
Publik Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

1.16.03.02.02 Sinkronisasi
Pengelolaan Rencana
Induk dan Anggaran
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

1.16.03.02.03 Pengelolaan
Pusat Data Pemerintahan
Daerah

1.16.03.02.08
Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

1.16.03.02.05 Koordinasi
dan Sinkronisasi Sistem
Keamanan Informasi

1.16.03.02.06 Koordinasi
dan Sinkronisasi Data dan
Informasi Elektronik

1.16.03.01.01 Pendaftaran
Nama Domain Pemerintah
Provinsi

1.16.03.02.07
Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Persentase (%) perangkat
daerah yang menggunakan
layanan pusat data pemerintah
pusat dan/atau pemerintah pusat
(Target: 50%)

- Persentase (%) layanan
publik dan layanan
administrasi
terintegrasi dengan
sistem penghubung
layanan pemerintah
daerah (Target: 60%)
- Persentase (%) layanan
publik dan layanan
administrasi yang
memanfaatkan
sertifikat elektronik
(Target: 60%)

Persentase (%) perangkat
daerah yang menggunakan
layanan infrastruktur pusat data
pemerintah daerah (NOC, ruang
server) dan/atau pusat data
pemerintah pusat (pusat data
nasional sementara) (Target:
60%)

- Persentase (%) layanan
publik, layanan warga negara
(KTP, Akta kelahiran, dan KK)
yang diselenggarakan secara
online (Target: 65%)
- Persentase (%) layanan
publik, layanan warga negara
(KTP, Akta kelahiran, dan KK)
yang terintegrasi dengan
sistem penghubung layanan
pemerintah daerah
(*berbagipakai data pada
layanan di Pemerintah
Daerah) (Target: 50%)
- Persentase (%) layanan
administrasi yang
diselenggarakan secara
online (Target: 65%)
- Persentase (%) layanan
administrasi yang
terintegrasi dengan sistem
penghubung layanan
pemerintah daerah
(*berbagipakai data pada
layanan di Pemerintah
Daerah) (Target: 50%)



Target dan Indikator Prioritas Nasional Tekait Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo.

Tabel Lampiran RPJMN 2020-2024

PROGRAM /KEGIATAN/ PROYEK	INDIKATOR						LOKASI	PROYEK RIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024			
Program Pengembangan Aplikasi Informatika									
Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat									
Fasilitas literasi digital bagi masyarakat	Jumlah Peserta Literasi Digital Bagi Masyarakat	10000000	20000000	30000000	40000000	50000000	Tersebar		5



Definisi digital literasi pada umumnya

- Kemampuan untuk secara efektif dan secara kritis untuk menerima, menavigasi, mengevaluasi dan memberikan informasi melalui alat-alat digital. Secara sederhana kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dengan baik.
- *Digital Literacy* meliputi semua perangkat digital, seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan ponsel.



Pentingnya digital literasi

- Tanpa adanya digital literacy penyalahgunaan digital akan makin meluas dan makin parah dan bisa merusak generasi muda.
- *Digital literacy* akan dapat mengarahkan orang-orang dalam penggunaan digital baik dan benar dan menumbuhkan generasi muda yang cerdas.



Positif dan negatif Dampak digital literasi

Dampak Positif :

Perkembangan teknologi yang sangat pesat,
Semakin berkembangnya layanan dan fasilitas berbasis internet,
Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dampak Negatif :

Pencurian data dan informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi dan negara,
Meningkatnya pelanggaran privacy seseorang,
Meningkatnya penipuan secara digital,
Pornografi, kekerasan yang ditampilkan untuk konsumsi public.



Manfaat dari adanya literasi digital

- Menghemat waktu,
- Belajar lebih cepat,
- Menghemat uang,
- Membuat lebih aman,
- Senantiasa memperoleh informasi terkini,
- Selalu terhubung,
- Membuat keputusan yang lebih baik,
- Dapat membuat anda bekerja,
- Membuat lebih bahagia, dan
- Dapat mempengaruhi dunia.



Elemen Penting Literasi Digital

- Elemen penting literasi digital adalah menyangkut kemampuan apa saja yang harus dikuasai dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Ada sembilan elemen penting dalam dunia literasi digital seperti :
 1. social networking,
 2. transliteracy,
 3. maintaining privacy,
 4. managing identity,
 5. creating content,
 6. organising and sharing content,
 7. reusing/repurposing content,
 8. filtering and selecting content, serta
 9. self broadcasting.



Penggunaan Digital Literacy dalam masyarakat

- Literacy dalam layanan jaringan sosial dan Web 2.0 adalah situs yang membantu orang untuk tetap berhubungan dengan orang lain, menyampaikan informasi yang tepat waktu dan bahkan menjual barang dan jasa.
- Digital Literacy juga dapat mencegah orang percaya hoax yang menyebar online atau merupakan hasil dari manipulasi foto. E-mail penipuan dan phishing sering mengambil keuntungan dari digital buta huruf, biaya korban uang dan membuat mereka rentan terhadap pencurian identitas.



PENUTUP



PENUTUP

Literasi digital itu bukan hanya sekedar kemampuan mencari, menggunakan dan menyebarkan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya. Akan tetapi, diperlukan kemampuan dalam membuat informasi dan evaluasi kritis, ketepatan aplikasi yang digunakan dan pemahaman mendalam dari isi informasi yang terkandung dalam konten digital tersebut. Disisi lain literasi digital mencakup tanggung jawab dari setiap penyebaran informasi yang dilakukannya karena menyangkut dampaknya terhadap masyarakat.



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri